

Dok L. 03/ 24/01/2022

LAPORAN KINERJA

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Ambon Tahun 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Ambon, 24 Januari 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini memuat tentang 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 4) Bab IV Penutup.

Kami menyadari bahwa LAKIN Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan ini.

Ambon, 24 Januari 2021

Kepala BBPPTP Ambon

M. Rizal Ismail, SP, M.Si
NIP. 197504252001121008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2021 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon sebagaimana dimatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 06 Pebruari 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/1A/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi proteksi.
- 2) Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan,
- 3) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Pagu alokasi anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon tahun 2021 sebesar Rp. 51.733.439.000 dan direvisi menjadi Rp. 40.387.776.000,- dikarenakan adanya refocussing anggaran covid19. Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp38,786,767,218 atau 96.04% dari anggaran belanja sebesar Rp 40,387,776,000. Secara garis besar, kegiatan tahun 2021 mengalami degradasi yang cukup signifikan disebabkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemic covid 19.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	3
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan	
2.1.1. Visi	3
2.1.2. Misi	4
2.1.3. Tujuan BBPPTP Ambon.....	5
2.1.4. Sasaran BBPPTP Ambon.....	7
2.1.5. Arah Kebijakan BBPPTP Ambon.....	7
2.1.6. Program BBPPTP Ambon	10
2.1.7. Fokus Kegiatan BBPPTP Ambon	10
2.1.8. Strategi BBPPTP Ambon.....	11

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Pengukuran Kinerja.....	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
3.3. Realisasi Anggaran	22
3.4. Realisasi Anggaran berdasarkan Output Kegiatan .	24
3.5. Permasalahan Umum	22
3.6. Isu Strategis Yang perlu ditindaklanjuti.....	24
3.7. Permasalahan Umum Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP	34
4.1. Kesimpulan	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kegiatan dan Output BBPPTP AMBON Tahun 2021.....	10
Tabel 2	Sasaran Indikator Kinerja dan target.....	12
Tabel 3	Capaian Kinerja BBPPTP Ambon.....	14
Tabel 4	Layanan Rekomendasi Proteksi.....	16
Tabel 5	Layanan Rekomendasi Perbenihan.....	19
Tabel 6	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	21
Tabel 7	Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan.....	24
Tabel 8	Nilai Efisiensi Program nilai tambah dan daya saing.....	26
Tabel 9	Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Belanja.....	26
Tabel 10	Permasalahan dan Saran Rekomendasi.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BBPPTP Ambon sebagai UPT Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, menjalankan tugas melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam tahun anggaran 2021, program yang diamanatkan untuk dilaksanakan yakni program nilai tambah dan daya saing industri

Sebagai penjabaran program tersebut, maka BBPPTP Ambon melaksanakan kegiatan yaitu Pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar, penguatan perlindungan perkebunan, penguatan perbenihan tanaman perkebunan, prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan sarana internal dan layanan prasarana internal. Output atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan, terlaksananya penerapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan dan terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan

2.1.1. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup dipersempit dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang harus selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 Berdasarkan Visi tersebut, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “Perkebunan Indonesia

yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”

2.1.2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan serta Kebutuhan Ekspor Komoditas Perkebunan dalam Memperkuat Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi dan guna

mendukung visi dan misi pembangunan tersebut diatas maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul.
- 2) Meningkatkan uji observasi, uji manfaat dan uji kelayakan benih dalam rangka pelepasan dan penarikan varietas.
- 3) Mengembangkan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*).
- 4) Meningkatkan ketersediaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan dan musuh alaminya.
- 5) Meningkatkan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT dan non OPT serta faktor yang mempengaruhi.
- 6) Mengembangkan teknik dan metode *surveillance*, pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan.

- 7) Mengembangkan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan serta PHT.
- 8) Meningkatkan uji pemanfaatan pestisida.
- 9) Meningkatkan pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 10) Terwujudnya sistem manajemen informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 11) Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- 13) Meningkatkan pelayanan organisasi

2.1.4. Sasaran

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 4) Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi proteksi.
- 5) Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan,
- 6) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2.1.5. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah: “Memperkuat SDM dan fasilitas laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan serta fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan”. Kebijaksanaan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu :

- 1) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan. Dimaksudkan untuk menjadikan SDM yang profesional sehingga mampu melaksanakan pelestarian dan kekayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam

penerapan PHT yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan petugas serta pendampingan bagi petani.

- 2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan. Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar.
- 3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, sehingga pelaksanaan pelestarian dan perkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut ditempuh upaya sebagai berikut :
 - Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu.

- Meningkatkan upaya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT.
 - Membantu upaya meningkatkan pengertian dan kesadaran untuk penerapan pengembangan PHT ramah lingkungan bagi petani.
- 4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi. Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :
- Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi.
 - Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan proteksi.

2.1.6. Program

Program Utama BBPPTP Ambon mengacu kepada program Ditjen Perkebunan, yaitu Program nilai tambah dan daya saing

2.1.7. Fokus Kegiatan

Sebagai penjabaran program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, maka BBPPTP Ambon melaksanakan kegiatan yaitu Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah, Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Tabel 1. Kegiatan dan output BBPPTP Ambon Tahun 2021

No	Kode Nama Kegiatan	Output
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	
	1777.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	583 unit
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	
	1779.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4 Rekomendasi Kebijakan
	1779.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5 Unit
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	
	5888 RA II Sarana Pengembangan Kawasan	4 unit
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	
	5890 BJA Penyidikan dan Pengujian Produk	650.000 produk
	5890 RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5 unit
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	
	1780 EAA Layanan Perkantoran	1 Layanan
	1780 EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3 Layanan
	1780 EAC Layanan Umum	2 Layanan
	1780 EAD Layanan Sarana Internal	1 Unit
	1780 EAE Layanan Prasarana Internal	1 Unit

2.1.8. Strategi

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Balai antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding serta rekrutmen tenaga fungsional sesuai kebutuhan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan media audio visual.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
- 4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.
- 5) Pengembangan dan pementapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Kegiatan Pembangunan Perkebunan 2021

Pagu alokasi anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon tahun 2021 sebesar Rp. 51.733.439.000 dan direvisi menjadi Rp. 40.387.776.000,- dikarenakan adanya refocussing anggaran covid19.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2021
(Sasaran, Indikator Kinerja dan Target)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi proteksi	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Ambon	8 Layanan
2	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Ambon	4 Layanan
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan diberikan	Indks kepuasan masyarakat atas layanan BBPPTP Ambon yang diberikan	3 skala likert (1-4)

Sumber Data : SAKIP /Revisi ke IV PK 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja BBPPTP Ambon disajikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis BBPPTP Ambon sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Capaian Kinerja sesuai Penetapan Kinerja BBPPTP Ambon disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2021 sesuai Penetapan Kinerja BBPPTP Ambon dan beberapa tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun						Capaian	Kriteria
			2019		2020		2021			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi proteksi	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Ambon	12	12	3	3	8			Berhasil
2	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Ambon	4	4	4	9	4	4	100	Berhasil
3	Meningkatnya keluasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan BBPPTP Ambon yang diberikan	-	-	-	-	3	3	100	Berhasil

Sumber Data :Laporan IKM 2019-2021/ SAKIP 2021 /Revisi ke IV PK 2021

Pembahasan Capaian kinerja Tahun 2021 sesuai dengan Penetapan Kinerja dikemukakan pada Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sesuai yang diamanahkan dalam PermenPAN&RB Tahun 2014, Laporan Kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Instansi Pemerintah diwajibkan mengevaluasi dan menganalisis kinerja berdasarkan aspek sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran);

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Secara analisis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Jumlah layanan Rekomendasi Data dan Informasi Proteksi BBPPTP Ambon (Layanan)

Tabel 4. Layanan rekomendasi Proteksi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun						Kriteria	
			2019		2020		2021			Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi proteksi	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Ambon	12	12	3	3	8	12	100	Berhasil

- a. Capaian kinerja layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Ambon dijabarkan sebagai berikut dari target sebanyak 8 layanan terealisasi sebanyak 12 layanan diantaranya :

1. Teknologi infus akar pada tanaman pala menggunakan metabolite sekunder *Beauveria bassiana* dan *Metharizium* dosis 500cc/tanaman dapat menurunkan gejala serangan *Batocera Hercules*

2. Teknologi Infus akar dan semprot pada tanaman kakao menggunakan metabolite sekunder *Verticilium* dan media sederhana trichoderma mampu menurunkan gejala busuk buah kakao
3. Teknologi Infus akar dan semprot pada tanaman cengkeh menggunakan metabolite sekunder *Metharizium anisopliae* dan media sederhana *Verticilium* dapat menurunkan gejala serangan *Captocercus bigantatus*
4. Teknologi infus akar pada tanaman Kelapa menggunakan metabolite sekunder *Metharizium bronstispa* dan *Beauveria bassiana* dapat menurunkan gejala serangan bronstispa
5. Teknologi induksi metabolite sekunder trichoderma 8ml/liter dapat menghambat perkembangan cacar daun pada bibit cengkih yang sudah bergejala
6. Metode uji kerapatan spora dan viabilitas agens pengendalian hayati golongan jamur
7. Metode eksplorasi, identifikasi, koleksi serangga OPT dan musuh alami

8. Penetapan model peramalan OPT kelapa, kakao, tebu dan kopi lingkup wilker BBPPTP Ambon.
 9. Metode beberapa perlakuan jamur *Metarhizium* sp dan *Beauveria bassiana* dengan dosis 500 ml/tanaman dapat menekan perkembangan OPT Penggerek Batang Tanaman Pala
 10. Metode penyemprotan metabolite sekunder *Trichoderma* sp dan *Verticillium* sp pada buah kakao dengan konsentrasi 4 gr/l dapat menghambat kemunculan penyakit BBK sekitar 50% pada musim hujan.
 11. Metode infus akar dan semprot menggunakan metabolit sekunder jamur *Metarhizium anisopliae* lebih efektif dari jamur *Verticillium* sp. dengan dosis yang sama, dapat mengendalikan Penggerek Batang Cengkih
 12. Metode pengendalian yang ramah lingkungan, serta menurunkan tingkat serangan hama *Brontispa* sp (kumbang janur) dengan infus akar (metabolik sekunder *Metarhizium anisopliae* dan *Beauveria bassiana*).
- b. Bila dibandingkan dengan kegiatan tahun 2020 rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 3 paket teknologi

sedangkan 2021 sebanyak 12 layanan teknologi dan metode yang dikembangkan

- c. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan tahun 2021 dibatasi karena terjadi pandemic covid 19 dan iklim musim hujan yang lebih rapat dan lebat sehingga jadwal Kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan di awal.
- d. Analisis penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan untuk mendapat rakitan teknologi spesifik lokasi. Disamping itu peralatan laboratorium perlu terus diupgrade untuk mendapatkan teknologi yang akurat dan valid ditingkat laboratorium. Metode pengujian yang digunakan di validasi agar mendapatkan metode baku.

2. Jumlah layanan Rekomendasi Data dan Informasi Perbenihan BBPPTP Ambon (layanan)

Tabel 5. Layanan rekomendasi Perbenihan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun						Kriteria	
			2019		2020		2021			Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Ambon	4	4	4	9	4	4	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan masuk dalam kategori berhasil dari target sebanyak 4 layanan dan terealisasi sebanyak 4 layanan yaitu :
 1. Sertifikasi benih tanaman perkebunan komoditi pala, cengkih, kakao dan tebu dari target sebanyak 500.000 batang, terealisasi sebanyak 495.039 batang.
 2. Rekomendasi teknis kebun sumber benih tanaman pala sebanyak 15 BPT dan Rekomendasi teknis kebun sumber benih tanaman cengkih sebanyak 14 BPT.
 3. Rekomendasi kelayakan produsen benih sebanyak 10 rekomendasi.
 4. Rekomendasi teknik Pengujian Mutu Benih tanaman perkebunan yang dihasilkan BBPPTP Ambon tahun 2021 yaitu 67 sertifikat hasil Uji Mutu Benih
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir kegiatan masih tetap sama untuk metode pengujian

- c. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kondisi pandemic menyebabkan sertifikasi benih di lapangan di lakukan secara virtual dan Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan kebun sumber benih mengalami hambatan karena PSBB namun diakhir tahun dapat diselesaikan serta terjadinya pergeseran musim panen sehingga berpengaruh pada ketersediaan contoh uji untuk pengembangan metode uji. Hal ini menyebabkan metode yang dikembangkan belum dapat divalidasi
- d. Analisis penggunaan sumber daya
- a. Petugas pengawas benih tanaman sebagai analis tersedia namun kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pengujian dan pengembangan metode uji perlu ditingkatkan terus menerus. Guna menunjang hal tersebut diperlukan pelatihan teknis/in house training bagi petugas POPT dan PBT
3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan BBPPTP Ambon yang diberikan (skala Likert 1-4)

Tabel 6. Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun						Kriteria	
			2019		2020		2021			Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya keluasan masyarakat terhadap layanan diberikan	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan BBPPTP Ambon yang diberikan	-	-	-	-	3	3	100	Berhasil

- a. Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan masuk dalam kategori 3,5 skala likert dari 156 responden dengan rincian responden sebagai berikut :

No	Responden	Jumlah
1	PNS/TNI/POLRI	15
2	Swasta	6
3	Wirausaha/Usahawan	30
4	Pelajar/Mahasiswa	17
5	Lainnya	88

- b. Bila dibandingkan dengan capaian IKM tahun 2020 dengan nilai IKM sebesar 3.3 skala likert dengan jumlah 190 responden Tahun 2021 terdapat peningkatan nilai IKM hal ini dikarenakan dengan banyaknya partisipasi pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan oleh BBPPTP Ambon diantaranya petani/penangkar, mahasiswa/pelajar, swasta dan pengguna jasa lainnya
- e. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan/pengisian IKM yaitu ada responden yang belum terlalu mahir dalam teknologi sehingga perlu adanya pendampingan petugas dalam pengisian IKM.

f. Analisis penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan sehingga data IKM yang diolah benar-benar akurat.

3.3 Realisasi Anggaran

Pagu alokasi anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon tahun 2021 sebesar Rp. 51.733.439.000 dan direvisi menjadi Rp. 40.387.776.000,- dikarenakan adanya refocussing anggaran covid19. Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp38,786,767,218 atau 96.04% dari anggaran belanja sebesar Rp 40,387,776,000. Secara garis besar, kegiatan tahun 2021 mengalami degradasi yang cukup signifikan disebabkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemic covid 19. Hal ini mengakibatkan kegiatan lapangan, pertemuan pembinaan dengan kelompok tani, pengawalan kegiatan perbenihan dan proteksi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu terjadi refocusing anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maximal.

Tabel 7. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu	Realisasi	%	
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	3.888.500.000	3.879.904.950	99.7	100
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	132.640.000	132.640.000	100	100
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	345.466.000	344.616.700	99.7	100
5888 RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	8.966.059.000	8.966.059.000	100	100
5890 BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	637.990.000	636.606.000	99.7	100
5890 RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Khutanan dan Lingkungan Hidup	8.850.306.000	8.439.369.337	95.3	100
1780 EAA	Layanan Perkantoran	10.088.795.000	8.970.930.568	88.9	100
1780 EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	980.150.000	980.150.000	100	100
1780 EAC	Layanan Umum	1.173.750.000	1.125.265.086	95.8	100
1780 EAD	Layanan Sarana Internal	3.796.920.000	3.794.028.040	99	100
1780 EAE	Layanan Prasarana Internal	1.057.500.000	1.056.985.268	99	100

Posisi Desember 2021

Berdasarkan PMK 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Pengukuran Efisiensi terdiri dari efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I, dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja. Efisiensi RO tingkat satuan di tingkat kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berikut:

- a.) Pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia
- b.) Pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi

anggaran RO tersedia

Pengukuran efisiensi RO yang dilakukan di tingkat KRO dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

ERO : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAKRO : alokasi anggaran KRO

RAKRO : realisasi anggaran KRO

CRO : capaian Realisasi RO

Tabel 8. Nilai Efisiensi Program nilai tambah dan daya saing

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					EFISIENSI	NILAI EFISIENSI (%)	KET
		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	%	FISIK					
		Rp.	VOLUME	SAT	Rp.		VOLUME	SAT	(%)			
1	Sarana Pengembangan Kawasan	3,888,500,000	583	unit	3,879,904,950	99.78	583	unit	100	0.22	50.55	
2	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	132,640,000	4	rekomendasi	132,640,000	100.00	4	rekomendasi	100	0.00	50.00	
3	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	345,466,000	5	unit	344,616,700	99.75	5	unit	100	0.25	50.61	
4	Sarana Pengembangan Kawasan	8,966,059,000	4	unit	8,966,059,000	100.00	4	unit	100	0.00	50.00	
5	Penyidikan dan Pengujian Produk	637,990,000	650000	produk	636,606,000	99.78	650000	produk	100	0.22	50.54	
6	Prasarana Bidang Pertanian, Khutanan dan Lingkungan Hidup	8,850,306,000	5	unit	8,439,369,337	95.36	5	unit	100	4.64	61.61	
7	Layanan Perkantoran	10,088,795,000	1	layanan	8,970,930,568	88.92	1	layanan	100	11.08	77.70	
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	980,150,000	3	layanan	980,150,000	100.00	3	layanan	100	0.00	50.00	
9	Layanan Umum	1,173,750,000	2	layanan	1,125,265,086	95.87	2	layanan	100	4.13	60.33	
10	Layanan Sarana Internal	3,796,920,000	1	layanan	3,794,028,040	99.92	1	layanan	100	0.08	50.19	
11	Layanan Prasarana Internal	1,057,500,000	1	layanan	1,056,985,268	99.95	1	layanan	100	0.05	50.12	
12	Layanan SDM	436,300,000	1	orang	436,300,000	100.00	1	Orang	100	0.00	50.00	
13	Layanan Monitoring dan Evaluasi Inernal	33,500,000	1	laporan	33,500,000	100.00	1	laporan	100	0.00	50.00	
	TOTAL/RATA-RATA	40,387,776,000			38,786,767,218	96.04					30.09	

Dari perhitungan tersebut nilai efisiensi diatas maka nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 30.09 % yang termasuk dalam kategori efisien dalam penggunaan anggaran.

Tabel 9. Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Belanja

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	51 BELANJA PEGAWAI	9,423,634,000	8,312.533.146	88,21%

2	52 BELANJA BARANG	20,640,264,000	20,157,534,817	97,66%
3	53 BELANJA MODAL	10,323,878,000	10,316,699,255	99,93%

Sumber : (SMART Kemenkeu)

Capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 88,21% dengan capaian fisik sebesar 100%.
2. Belanja Barang terealisasi sebesar 97,66% dengan capaian fisik sebesar 100%.
3. Belanja Modal terealisasi sebesar 99,93% dengan capaian fisik sebesar 100%.

3.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan

Secara umum capaian output kegiatan BBPPTP Ambon adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar
 - a) Sarana Pengembangan Kawasan dengan serapan sebesar 99,7% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 2) Penguatan Perlindungan Perkebunan
 - a) Kebijakan Bidang Pertanian dan dengan serapan sebesar 100 % dan capaian fisik sebesar 100%.

- b) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan serapan sebesar 99.7% dan capaian fisik sebesar 100%
- 3) Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah
 - a) Sarana pengembangan kawasan dengan serapan sebesar 100% dan capaian fisik sebesar 100%.
- 4) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - a) Penyidikan dan pengujian produk dengan serapan sebesar 99.7% dan capaian fisik sebesar 100%.
 - b) Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan serapan sebesar 95.3% dan capaian fisik sebesar 100%.
- 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
 - a) Layanan Perkantoran serapan sebesar 88.9% dan capaian fisik sebesar 100%.
 - b) Layanan Perencanaan dan Penganggaran internal serapan sebesar 100% dan capaian fisik sebesar 100%
 - c) Layanan Umum serapan sebesar 95.8% dan capaian

fisik sebesar 100%.

d) Layanan Sarana Internal serapan sebesar 99% dan capaian fisik sebesar 100%.

e) Layanan Prasarana Internal serapan sebesar 99% dan capaian fisik sebesar 100%.

3.5 Permasalahan umum realisasi anggaran tahun 2021

a. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan untuk mengendalikan pandemic berakibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2021 antara lain :

- Pembatasan jumlah pegawai yang masuk kantor mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan
- Jumlah pemohon/pemangku kepentingan yang dilayani oleh Balai berkurang
- Adopsi teknologi ditingkat petani mengalami hambatan karena kegiatan proteksi dan perbenihan di lapangan dibatasi.
- Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal palang karena beberapa kali revisi anggaran akibat *refocusing*.

b. Pengelolaan database dalam rangka penyediaan data dan informasi yang valid terkendala karena terjadi revisi

sehingga tidak dapat dimaksimalkan

- c. Sarana dan prasarana laboratorium perlu ditingkatkan untuk mendukung pengujian.
- d. Layanan virtual belum dapat berfungsi secara maksimal. Disebabkan karena akses jaringan internet belum dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung layanan secara virtual. Disamping itu petani belum terbiasa mengakses layanan secara virtual. Petugas layanan perlu ditingkatkan kompetensinya untuk memberikan layanan. Untuk mengantisipasinya perlu dimaksimalkan jaringan internet, melaksanakan sosialisasi layanan virtual dan meningkatkan kompetensi petugas layanan.
- e. Contoh uji pengujian mutu benih di laboratorium mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pengambilan contoh uji tidak maksimal. Selain itu produsen benih tidak aktif mengajukan permohonan pengujian mutu karena belum diterapkannya persyaratan dalam pengujian mutu di laboratorium sebagai dasar produksi benih. Untuk mengantisipasinya maka dokumen permohonan sertifikasi mutu layak edar perlu ditambahkan dengan hasil pengujian mutu di laboratorium

- f. Pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di wilayah kerja diawal masa pandemic sampai dengan akhir tahun. Kegiatan pengawasan peredaran benih hanya dapat dilaksanakan pada lokasi peredaran benih yang terdekat. Untuk mengantisipasi hal ini maka ditingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha perbenihan dan masyarakat penerima benih.

3.6 Isue Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti

- a. Meningkatkan mutu layanan internal dan eksternal

Mutu layanan ditingkatkan dengan memaksimalkan jaringan internet lingkup balai, meningkatkan kompetensi petugas layanan, menyempurkan prosedur layanan internal dan eksternal

- b. Pengelolaan data base

Mekanisme pengelolaan database benih dan proteksi perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, tepat waktu, valid dan dapat dipercaya serta memudahkan pemangku kepentingan mengakses data lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan.

c. Adopsi teknologi proteksi tanaman perkebunan

Kedepan diharapkan kegiatan kajian dapat menghasilkan ditingkat laboratorium dapat diterapkan di lapangan untuk mendapatkan teknologi terapan pengendalian OPT ramah lingkungan, biaya rendah dan mudah diaplikasikan di tingkat petani. Salah satu cara untuk menerapkan hal tersebut dengan membangun lebih banyak demplot PHT untuk pengendalian OPT

d. Benih bersertifikat dan berlabel.

Pengawasan terhadap benih bersertifikat dan berlabel walaupun sebagian besar dilaksanakan secara virtual masih perlu ditingkatkan dengan mengurangi peredaran benih yang ilegal, meningkatkan jumlah produsen benih yang memiliki ijin produksi benih, meningkatkan jumlah kebun sumber benih (KI,BPT,PIT) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Diharapkan tugas PPNS tidak sebatas peninjauan saja tetapi perlu kerjasama dengan membuat pos penjagaan demi menghindari proses peredaran benih tanaman perkebunan yang legal maupun ilegal sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dilain pihak perlu diberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku yang

melanggar peraturan perbenihan perkebunan, perlu membangun kerjasama dengan instansi terkait yang berada di wilayah kerja agar bisa mencegah peredaran benih palsu dan perlunya dibangun pos penjagaan di daerah yang sering terjadi peredaran dan guna memperancar proses penyidikan perlu dibuat format berita acara sebagai pegangan bagi petugas bila kedatangan keganjalan dalam proses peredaran benih.

Tabel 10. permasalahan dan saran rekomendasi peningkatan

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	DAMPAK	UPAYA YG DILAKUKAN	SARAN REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembatasan jumlah pegawai yang masuk kantor	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan untuk mengendalikan pandemic berakibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2021	Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan	memaksimalkan kinerja pegawai dengan	melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai	Kepala Balai
2	Jumlah pemohon/pemangku kepentingan yang dilayani oleh Balai berkurang		kinerja layanan menurun	meningkatkan layanan virtual	melakukan sosialisasi layanan virtual	Kepala Balai
3	Adopsi teknologi ditingkat petani mengalami hambatan karena kegiatan proteksi dan perbenihan di lapangan dibatasi.		kinerja layanan menurun	meningkatkan layanan virtual terkait adopsi teknologi proteksi dan benih	melakukan sosialisasi layanan virtual	Kepala Balai
4	Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal palang karena beberapa kali revisi anggaran akibat <i>refocusing</i> .		Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan	memaksimalkan kegiatan di akhir tahun	realisasi anggaran harus sesuai dengan jadwal yang telah disepakati	PPK
5	Pengelolaan database dalam rangka penyediaan data dan informasi tidak maksimal		revisi sehingga tidak dapat dimaksimalkan	database tidak terbaru	menyusun usulan peningkatan di tahun yang akan datang	usulan peningkatan pengelolaan data base

6	Sarana dan prasarana laboratorium belum maksimal untuk mendukung pengujian.	revisi sehingga tidak dapat dimaksimalkan	kinerja layanan menurun	menyusun usulan peningkatan di tahun yang akan datang	usulan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium	Koordinator kelompok substansi
NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	DAMPAK	UPAYA YG DILAKUKAN	SARAN REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
7	Layanan virtual belum dapat berfungsi secara maksimal.	akses jaringan internet belum dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung layanan secara virtual. Disamping itu petani belum terbiasa mengakses layanan secara virtual. Petugas layan perlu ditingkatkan kompetensinya untuk memberikan layanan.	Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan	menyusun usulan peningkatan di tahun yang akan datang	memaksimalkan jaringan internet, melaksanakan sosialisasi layanan virtual dan meningkatkan kompetensi petugas layanan.	Koordinator kelompok substansi
8	Contoh uji pengujian mutu benih di laboratorium mengalami penurunan.	Kegiatan pengambilan contoh uji tidak maksimal. Selain itu produsen benih tidak aktif mengajukan permohonan pengujian mutu karena belum diterapkannya persyaratan dalam pengujian mutu di laboratorium sebagai dasar sertifikasi benih.	kinerja layanan menurun	Dokumen permohonan sertifikasi mutu layar edar perlu ditambahkan dengan hasil pengujian mutu di laboratorium	melakukan sosialisasi layanan pengujian laboratorium dan proses sertifikasi secara virtual	Koordinator kelompok substansi

9	Pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di wilayah kerja diawal masa pandemic sampai dengan akhir tahun. Kegiatan pengawasan peredaran benih hanya dapat dilaksanakan pada lokasi peredaran benih yang terdekat.	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan untuk mengendalikan pandemic berakibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020	benih yang beredar tidak terjamin standar mutunya	meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha perbenihan dan masyarakat penerima benih.	melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan petugas yang mengawasi pintu masuk keluar transportasi benih	Kepala Balai
---	---	---	---	--	---	--------------

BAB IV

PENUTUP

Pagu alokasi anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon tahun 2021 sebesar Rp. 51.733.439.000 dan direvisi menjadi Rp. 40.387.776.000,- dikarenakan adanya refocussing anggaran covid19. Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp38,786,767,218.00 atau 96.04% dari anggaran belanja sebesar Rp40,387,776,000.00.

Secara garis besar, kegiatan tahun 2021 mengalami degradasi yang cukup signifikan disebabkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemic covid 19. Hal ini mengakibatkan kegiatan lapangan, pertemuan pembinaan dengan kelompok tani, pengawalan kegiatan perbenihan dan proteksi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu terjadi refocusing anggaran, dan terlambatnya pencairan dana kegiatan di akhir tahun karena revisi pagu minus.

Mengantisipasi hal tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional kegiatan khususnya di yakni sertifikasi mutu benih dilaksanakan secara virtual, begitu pula dengan kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang diselenggarakan secara virtual, memaksimalkan kegiatan pengujian di laboratorium dengan

menerapkan protokol kesehatan sebagai pengganti kegiatan pengujian di lapangan, meningkatkan penggunaan layanan dan penyebaran informasi secara virtual lewat website, media social dan layanan si ben mepet ima.

Pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh BBPPTP Ambon dalam tahun anggaran 2021, yakni Capaian kinerja layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Ambon dijabarkan sebagai berikut dari target sebanyak 8 layanan terealisasi sebanyak 12 layanan. Capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan masuk dalam kategori berhasil dari target sebanyak 4 layanan dan terealisasi sebanyak 4 layanan dan dikategorikan berhasil